

**“REKONSTRUKSI TERHADAP PERBUATAN PROSTITUSI
PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA”**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-2
Program Studi Magister Ilmu Hukum**



Disusun oleh :

NOOR FAJARI ROZIQ

NIM: 201720380211015

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
September 2020**

**“REKONSTRUKSI TERHADAP PERBUATAN PROSTITUSI
PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA”**

Diajukan oleh :

NOOR FAJARI ROZIQ
201720380211015

Telah disetujui

Pada hari/tanggal, 08 September 2020

Pembimbing Utama

Mokh. Najih, S.H., M.H., Ph.D

Pembimbing Pendamping

Dr. Haris, SH., M.Hum

Direktur
Program Pascasarjana



Prof. A. Ghazali In'am, Ph.D

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Mokh. Najih, S.H., M.H., Ph.D

TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh :

NOOR FAJARI ROZIQ
201720380211015

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada hari/tanggal, Selasa/ **08 September 2020**
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua	:	Mokh. Najih, S.H., M.H., Ph.D
Sekretaris	:	Dr. Haris, SH., M.Hum
Penguji I	:	Dr. Tongat, SH., M.Hum
Penguji II	:	Dr.Surya Anoraga, SH.,MH

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dalam Penulisan Thesis dapat diselesaikan meskipun banyak hambatan serta kendala akan tetapi tidak membuat putus asa serta pesemis berkat Allah SWT, serta Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikutnya.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Thesis yang berjudul ini **“REKONSTRUKSI TERHADAP PERBUATAN PROSTITUSI PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA”**. banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala sepanjang perjalanan yang dihadapi penulis dapat diatasi. Untuk itu, penulis menyampaikan segenap ucapan terima kasih kepada Bapak Mokh Najih, SH.,Ph.D. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Haris, SH, MH selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, kritik, saran dan masukan yang sangat berharga kepada penulis selama proses penyusunan Thesis ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada:

1. Terimakasih kepada kedua Orang Tuaku, Drs. H .M. Samlan M.Pd dan Ibu Roro Latifah Noor S.E serta kakakku Moh Hadiatur Rahman M.Pd, Sungguh, jika bukan karena doa dan dukungan kedua orang tua dan keluarga yang selalu menyemangati penulis, maka penyusunan Thesis ini hanyalah angan.
2. Bapak Direktur Akhsanul In'am, Ph.D. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang
3. Bapak Mokhammad Najih,SH.,Ph.D selaku. Kaprog. Magister Ilmu Hukum

4. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Magister Ilmu Hukum UMM yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan dari awal semester hingga akhir penulisan skripsi ini.
5. Terimakasih atas didikan kepada kawan kawan seperjuangan IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH SUPREMASI HUKUM UMM yang telah mentransformasikan keilmuannya serta pengalamannya sehingga banyak hal perubahan bagi saya dalam intelektualitas, kedewasaan, kepeduliannya terhadap sesama manusia dan bermanfaat bagi masyarakat.
6. Sahabat-sahabat yaitu, Bima Haryo Hutomo, Tito Muhammad, Gista amalia, Arif hidayat, Riska novita sari, Rudy adi prawira , Kurnia sandi, Terima kasih atas memberikan dukungan dan semangat
7. Terimakasih Kepada Temen Hidup Yang Selalu Memberi Dukungan Semangat Dalam Menyelesaikan Thesis.
8. Terimakasih kepada seluruh teman-teman Pascasarjana Magister Ilmu Hukum angkatan 2017 dan 2018 yang memberikan support dan dorongan demi kelancaran penulisan Thesis ini. Semoga kalian juga dimudahkan dan dilancarkan, Amin.
9. Terimakasih kepada Muhammad Rakha sebagai partners GS & Associates yang telah memberikan motivasinya terhadap kami untuk menyelesaikan tugas akhir ini;
10. Terimakasih kepada PT NOVATIC ADHYASTA MANDIRI yang berjenis usaha skin clinic – cinematika – property yang telah mempercayai kami selaku Legal Officer dan motivasi semangat serta ilmu yang bermanfaat kepada kami
11. Terimakasih kepada teman teman seperjuangan di kampung yang telah membantu demi kelancaran penulisan Thesis ini yaitu, Fajar dwi, Bara yoga tama anteng galih , Moh khairul ,Fredika ,Moh herilianto, Adip, dkk.
12. Terimakasih kepada rekan – rekan kerja di LBH NERATJA JUSTITIA yang telah memberikan dukungan dan ilmu yang bermanfaat kepada kami.

13. Dan terakhir, terima kasih untuk semua pihak yang bersangkutan dan telah membantu baik dalam memberikan support dan dorongan untuk penulis yang namanya tidak dapat disebutkan satu-persatu. Terima kasih.

Akhir kata kepada penulis Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati melalui Gmail yaitu: Roziq.bildomz@gmail.com. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi mahasiswa ,masyarakat dalam menambah materi akademik Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum UMM di kemudian hari

Billahi Fisabilllihaq Fastabiqul Khairat

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Malang, 06 September 2020

NOOR FAJARI ROZIQ

DAFTAR ISI

Lembar Cover/ Sampul Dalam	1
Halaman Pengesahan	2
Halaman Daftar Peguji	3
Tata pengantar	4
Daftar Isi.....	7
Surat Pernyataan.....	8
Abstraksi	9
<i>Abstract</i>	10
Pendahuluan	
a. Latar Belakang.....	11
b. Permasalahan	15
c. Tujuan Penelitian.....	15
2. Originalitas Penelitian	15
3. Kerangka Kerja Teoritis	
a. Tinjauan Umum Konsep Tentang Prostitusi	17
b. Tinjauan Umum Peraturan Perundang – Undangan Dan Norma Agama Yang Berkaitan Tentang Prostitusi	19
c. Tinjauan Umum Konsep Komsep Teori Kriminalisasi	24
d. Tinjauan Umum Tentang Pembaharuan Hukum Pidana	26
4. Metode Penelitian	27
5. Pembahasan	29
6. Penutup	42
Daftar Pustaka	44

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **NOOR FAJARI ROZIQ**

NIM : **201720380211015**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. TESIS dengan judul: **"REKONSTRUKSI TERHADAP PERBUATAN PROSTITUSI PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA"**
2. Adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
3. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 09 September 2020
Yang menyatakan,




NOOR FAJARI ROZIQ

ABSTRAKSI

Nama : NOOR FAJARI ROZIQ
NIM : 201720380211015
Email : roziq.bildomz@gmail.com
Judul : **REKONTRUKSI TERHADAP PERBUATAN
PROSTITUSI PERSPEKTIF PEMBAHARUAN
HUKUM PIDANA**
Pembimbing : Mokh, Najih SH., M.Hum ,Ph.D. NIDN: 0017056501
Dr. Haris, SH., MH. NIDN: 0013076701

Abstrak

Kasus pelacuran atau prostitusi sebagai subyek hukum pelaku pekerja seks (PSK) dan pengguna jasa seks sampai saat ini bebas menjalani tanpa adanya ancaman hukuman. Pelacuran atau Prostitusi dalam perspektif hukum di tinjau dalam Kitab undang - undang Hukum pidana pada pasal 296 dan 506 hanya menjerat pelaku germo, dan mucikari saja dan dari lahir nya Undang – undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) sebagaimana dalam pasal 27 ayat 1 jo pasal 45 di dalam UU ITE pun permasalahan prostitusi online tidak termuatkan unsur - unsur secara normative dalam undang - undang tersebut, begitupun diperaturan Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan peraturan nomer 21 tahun 2007 tentang Tindak pidana perdagangan orang (TPPO). dari beberapa peraturan yang berkaitan dengan persoalan pelacuran atau prostitusi yang ada belum ada aturan yang mampu menghukum pelacur atau prostitusi dan pelanggannya .maka perlu adanya rekontruksi hukum untuk tercapai hukum yang responsive maka perlu pembaharuan hukum untuk tercapai hukum yang di cita citakan

Tujuan dilakukan peneliti ini untuk Mengetahui dan memahami Kontruksi Tindak Pidana Prostitusi dalam KUHP dan RUU KUHP dikaitkan dengan Norma Agama.dan Mengetahui dan memahami Kontruksi Perumusan Tindak Pidana Prostitusi yang Ideal dan sesuai dengan Norma Agama bagi masyarakat Indonesia. Adapun metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan atau (*statute approach*) dan (*analytical and conceptual approach*) pendekatan analisis konsep hukum.

Maka dalam tahap Rancangan KUHP pada saat ini yang masi dalam tahap revisi pembahasan di tataran legislative bahwa pembentukan regulasi dalam tindak pidana kesusilaan khususnya persoalan tindak pidana prostitusi Perlu menggali konsep nilai - nilai dasar filosofis, sosiologis dan yurudis bahwa negara untuk memiliki kepastian hukum dalam masyarakat. Maka menggali nilai nilai filosofis Pancasila sila ke 1 Ketuahan yang Mahasa Esa bahwa lima agama yang berlaku di Indonesia antara lain agama islam, Kristen – khatolik, Hindu- Budha dan Konghucu telah Menegaskan bahwa perbuatan praktik prostitusi hukumnya dilarang.

Kata Kunci : Rekontruksi Hukum Prostitusi, Para pihak, Pembaharuan hukum pidana

Abstract

Name : NOOR FAJARI ROZIQ
NIM : 201310110311050
Email : roziq.bildomz@gmail.com
Title : .RECONSTRUCTION OF PROSTITUTION IN PERSPECTIVE OF CRIMINAL LAW REFORM
Advisor : Mokh,Najih SH., M.Hum ,Ph.D. NIDN: 0017056501
Dr. Haris, SH., MH. NIDN: 0013076701

Cases of prostitution or prostitution as the legal subject of sex offenders (PSK) and sex service users until now are free to serve without the threat of punishment. Prostitution or Prostitution in the legal perspective is reviewed in the Statute Book - the criminal law in sections 296 and 506 ensnares only pimps, and pimps only and from the birth of Law No. 11 of 2008 on information and electronic transactions (ITE) as in article 27 paragraph 1 jo article 45 in the ITE Act even the issue of online prostitution is not contained elements - elements normatively in the law - the law , as well as regulation No. 44/2008 on pornography and regulation number 21 of 2007 on people trafficking crimes (TPPO). of some regulations related to the issue of prostitution or prostitution that there are no rules that are able to punish prostitutes or prostitutes and their customers .then there needs to be a legal reconstruction to achieve a responsive law then it needs to reform the law to achieve the law that is in the goal

The purpose of this researcher is to know and understand the Construction of Prostitution Crimes in the Criminal Code and The Penal Code Bill is associated with Religious Norms.and Know and understand the Construction of Formulation of Prostitution Crimes that are Ideal and in line with religious norms for Indonesian society. As for normative juridical research methods. The approach used in this writing is the statutory approach or (analytical and conceptual approach) approach of legal concept analysis. So in the current phase of the Draft Criminal Code which is masi in the revised stage of discussion in the legislative state that the establishment of regulation in the criminal act of decency, especially the issue of prostitution crimes Need to explore the concept of values - fundamental philosophical, sociological and yurudis values that the state to have legal certainty in society. So digging into the philosophical value of Pancasila sila to 1 Ketuhanan mahasa Esa that five religions that apply in Indonesia including Islam, Christianity – khatolik, Hindu- Buddhism and Confucian has asserted that the practice of prostitution is forbidden.

Keywords: The reconstruction of the law of prostitution, the parties, the renewal of criminal law

A. Latar Belakang

Prostitusi merupakan bentuk kriminalitas yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Perkembangan praktik prostitusi pada saat ini semakin marak melalui basis online untuk mempermudah akses dalam memberikan penawaran kepada pengguna jasa seks komersil.

Perbuatan praktik prostitusi terjadi difaktori dengan keadaan ekonomi, Pendidikan, dan Social, serta minimnya pengetahuan norma agama. Dalam praktik prostitusi seorang perempuan merelakan dirinya untuk bekerja menjadi profesi sebagai pekerja seks komersial yang di singkat (PSK) dan diperbantukan oleh Mucikari. Penawaran praktik prostitusi di temukan dalam aktifitasnya melalui beberapa aplikasi media social yakni: *Facebook, Twitter, Tantan, dan Mi Chat* untuk memberikan penawaran dirinya kepada pengguna jasa prostitusi.¹

Adapun Fakta (*dass sein*) yang terungkap pada kasus Praktik prosititusi yang di proses secara Hukum ialah :

Contoh kasus prostitusi online oleh Robby Abbas (RA) yang Tertangkap Pada bulan Mei Tahun 2015, Tersangka RA memiliki 200 Pekerja Seks Komersial (PSK) yang siap ditawarkan kepada pengguna jasa prostitusi online. Tarif pengguna jasa prostitusi online bervariasi hingga mencapai puluhan juta dan RA memperoleh keuntungan 20 persen dari setiap transaksi. RA telah menjalankan bisnis prostitusi online selama tiga tahun ,menggunakan *blackberry messenger* (BBM) sebagai media untuk menawarkan PSK, Sementara polisi telah melimpahkan berkas RA ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Mucikari yakni RA di kenakan Pasal 296-506 KUHP tentang Kesusilaan dengan ancaman kurungan 1 tahun 4 bulan lamanya.²

Adapun Pada contoh kasus peristiwa diatas bahwa wanita yang sebagaimana bekerja di bidang praktik protitusi yang di sebut sebagai pekerja seks komersial (PSK) dan pihak yang menggunakan jasa pun bebas menjalani tanpa adanya ancaman hukuman.

¹ Palandi, 'Tanggung Jawab Pidana Bagi Penyedia Jasa Prostitusi Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik'Vi.1 (2017), 141–49.

² Ni Komang And Others, 'Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia?', Articles :Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia, 07.04 (2018), 1–15.

Jika praktik prostitusi online di tinjau dalam perspektif Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) di dalam KUHP secara definisi tentang prostitusi tidak di jelaskan secara pengertiannya namun yang berkaitan dengan praktik prostitusi diatur dalam pasal 296 dan pasal 506 Dari pasal 296 dan 506 yang termuat unsur prostitusi dalam KUHP hanya menjerat pelaku yang mencari keuntungan (mucikari) dan penyediaan tempat untuk mempermudah perbuatan cabul (Germo) untuk para Pekerja Seks Komersil (PSK) dan pengguna jasa lepas dari jeratan hukum.

Pengguna jasa tidak dapat di hukum dengan menggunakan pasal 296 dan pasal 506 terkecuali Pengguna jasa Prostitusi dapat di Jerat oleh hukum apabila terpenuhi unsur – unsur dalam pasal 284 tentang perzinahan namun kelemahan dalam pasal 284 tersebut teruntuk bagi yang status sudah menikah dan pasal 284 tersebut merupakan delik aduan yang kemudian jika tidak ada laporan pengaduan dari pihak yang dirugikan suami atau istri terhadap perzinahan sebagaimana dalam pasal 284 maka sah dilakukan perbuatan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Perbuatan perostitusi PSK dan pengguna seks Kormersialnya di kaitkan dengan pasal tersebut yang terikat pada status perkawinan sehingga terjadi kekosongan hukum.

Tinjauan Praktik Prostitusi di luar KUHP yakni Undang - undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) sebagai mana dalam pasal 27 ayat 1 jo pasal. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1). Persoalan prostitusi online pada prakteknya tidak tercover dalam regulasi tersebut maka para pihak yang terlibat dalam praktek prostitusi Pekerja seks komersil dan pengguna jasa bebas dari jeratan hukum Para pihak sebatas penyedia, germo, mucikari terkait dengan pekerja seks dan pengguna jasa tidak tersentuh hukum.

Undang – undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornoografi Point penting dalam praktek prostitusi hanya dapat mempidanakan Pelaku Penyedia Jasa (Mucikari), yang memuat gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan

di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Melihat aturan yang mengatur tentang kesusilaan belum mengatasi permasalahan tersebut artinya ada peraturan hukumnya tentang kesusilaan namun belum cukup untuk menjerat pekerja seks dan pengguna jasa prostitusi.

Sebagaimana dengan undang – undang tindak pidana perdagangan orang nomor 21 tahun 2007 sebagaimana harus termuat unsur Perdagangan Orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi namun dalam Undang- undang Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut dalam kasus prostitusi yang bisa di jerat oleh hukum adalah orang yang memperdagangkan orang dengan cara menggunakan Perekrutan orang, Pengangkutan orang, Penampungan oraang, Pengiriman orang, Pemindahan orang, atau Penerimaan Seseorang yang dapat diancam dengan Kekesasaran, Penggunaan Kekerasan, Penculikan, Penyekapan, Pemalsuan, Penipuan dan Penyalahgunaan kekuasaan.

Dari berberapa regulasi baik undang – undang secara umum KUHP dan secara khusus undang – undang di Luar KUHP yang berkaitan dengan perbuatan praktik prostitusi bahwa Pidanaan hanya terhadap mucikari atau geromo dalam hal ini regulasi yang berkaitan dengan praktik prostitusi mengalami kekosongan hukum sehingga berakibat tidak mencerminkan rasa keadilan menimbulkan diskriminasi dalam penyelesaiannya.

Perbuatan Prostitusi online di kategorikan Korban sekaligus pelaku (*crime without victim*). Dalam hal ini regulasi baik secara undang- undang kitab hukum pidana umumnya maupun secara regulasi khusus hukum pidana

bahwa saat ini tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan para pihak yang terlibat dalam praktek prostitusi Online.

Maka seharusnya (*das sollen*) Pemerintahan Negara dalam hal ini pembuat pembentukan peraturan perundang-undangan atau Legislatif perlu menggali regulasi yang sesuai dengan filosofis bangsa negara dan Pemerintah perlu menggali sejumlah peraturan-peraturannya atau sumber hukum sehingga dalam peraturan tersebut terdapat ketentuan sanksi yang tegas dan dapat dipaksakan serta menjadikan Salah satu instrumen untuk mengatur kehidupan masyarakat. Sebab perbuatan praktik prostitusi merupakan perbuatan yang menyimpang dari norma agama, kesopanan dan kesusilaan dalam masyarakat maka pemerintah yang berwenang perlu kontruksikan untuk membuat Rancangan Peraturan undang –undang yang ideal dalam formulasi kebijakan kriminalisasi terhadap perbuatan prostitusi dan pertanggung jawaban terhadap PSK dan Pengguna untuk upaya preventif atau mencegah timbulnya praktik prostitusi baik secara online maupun offline guna mencapai tata tertib, keamanan dan kepastian hukum serta demi keadilan sebab KUHP saat ini secara Filosofis, Sosiologis dan layak untuk di formulasikan secara khusus perbuatan prostitusi di dalam regulasi Rancangan Kitab Hukum Pidana daan menggali nilai – nilai yang hidup di tengah – tengah masyarakat.

Demi Tujuan mewujudkan Berdasarkan perspektif nilai nilai filosofis Ketuhanan (Norma Agama) untuk pembangunan hukum nasional atau pembaharuan hukum pidana di indonesia maka dengan cara menggali nilai nilai norma sebagaimana yang bersumber filosofis bangsa negara (pancasila) yang hidup di masyarakat untuk memperoleh Keadilan tanpa mendiskriminasi, kepastian hukum dan Kemanfaatan.³

Maka demikian Berdasarkan adanya kenyataan tersebut diatas yang melatarbelakangi penulis untuk memilih judul Jurnal Thesis :

“REKONTRUKSI TERHADAP PERBUATAN PROSTITUSI PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA” .

³ Dwiyana, Penanggulangan praktek prostitusi dalam pembaharuan hukum pidana nasional dan hukum islam di indonesia,Pp. 53–64.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kontruksi Tindak Pidana Prostitusi dalam KUHP dan RUU KUHP dikaitkan dengan Norma Agama ?
2. Bagaimana Kontruksi Perumusan Tindak Pidana Prostitusi yang Ideal dan sesuai dengan Norma Agama bagi masyarakat Indonesia ?

C. Tujuan Peneliti

1. Mengetahui dan memahami Kontruksi Tindak Pidana Prostitusi dalam KUHP dan RUU KUHP dikaitkan dengan Norma Agama.
2. Mengetahui dan memahami Kontruksi Perumusan Tindak Pidana Prostitusi yang Ideal dan sesuai dengan Norma Agama bagi masyarakat Indonesia.

E. Originalitas Penelitian

Untuk Mengetahui originalitas atau keaslian peneliti, maka peneliti membandingkan hasil yang di peroleh peneliti dengan hasil peneliti yang terdahulu untuk menyimpulkan bahwa penelitian yang di peroleh peneliti belum di teliti oleh peneliti terdahulu dalam penelitiannya maka peneliti memaparkan di bawah sebagai berikut.

F. Peneliti Terdahulu.

1. **Mia Amalia**, Judul Jurnal : Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan Di Kawasan Cisarua Kampung Arab.

Jurnal Hukum tersebut membahas terkait dengan Pertanggungjawaban Para Pihak Yang Terlibat Dalam Prostitusi dan menganalisis Etika Dan Moral Terhadap Tindak Pidana Prostitusi dan Upaya-Upaya Hukum Apa Yang Dapat Dilakukan Untuk Mencegah Dan Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Prostitusi.

Adapun penulis menemukan perbedaan antara jurnal hukum diatas dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan Perbedaan Dengan Peneliti Terdahulu ialah Mengkhususkan Permasalahan Analisis Tindak Pidana Prostitusi Kepada Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan Dikawasan Cisarua Kampung Arab Sedangkan Yang Akan D Bahas Oleh

Penulis Disini Ialah Mengenai Analisis Kriminalisasi Prostitusi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana.⁴

2. Melinda Arsanti, Judul Jurnal: Penggunaan Media Social Sebagai Sarana Prostitusi Online.

Jurnal Hukum Membahas Terkait Sejauh Mana Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi Online adapun penleiti menemukan Perbedaan pada peneliti Terdahulu ialah Menitik Beratkan Kepada Penggunaan Media Social Sebagai Sarana Prostitusi Online Sedangkan Yang Akan D Bahas Oleh Penulis Disini Ialah Mengenai analisis Kriminalisasi Protitusi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana.⁵

3. Ni Komang Ayu Gendis Saraswati Made Subawa, Judul Jurnal : Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online Menurut HukumPositif Di Indonesia.

Jurnal Hukum Membahas Terkait Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Di Indonesia Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Di Indonesia.

Adapun peneliti menemukan perbedaan dalam peneliti terdahulu ialah: Mengfokuskan Kepada Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Dan Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Jasa Online Sedangkan Peneliti Penulis Ialah Mengfokuskan Bagaimana Kriminalisasi Prostitusi Dalam Pembaharuan Yang Memfokuskan Kepada Pekerja Seks Dan Pengguna Jasa Prostitusi Online.⁶

⁴ Amalia, Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan Di Kawasan Cisarua Kampung Arab Vol 2, No 2 (2016) <https://jurnal.unsur.ac.id> diakses, pukul 03-54 Wib tanggal 08 - 12 – 2019.

⁵ Melinda, Penggunaan Media Social Sebagai Sarana Prostitusi Online (2017) hal50-62. <https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id> diakses pukul 08-54 Wib tanggal 13 - 01 – 2020.

⁶ Ni komang, Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online Menurut Hukum Positif di Indonesia. Vol.07, No. 04, (2018) <https://ojs.unud.ac.id> diakses pukul 10.54 Wib tanggal 13 - 01 - 2020.

G. Kerangka Kerja Teoritis

1. Tinjauan Umum Konsep Tentang prostitusi.

a. Pengertian Tentang Prostitusi

Prostitusi atau juga bisa disebut pelacuran berasal dari bahasa Latin yaitu *prostituere* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan perbuatan persundalan, pencabulan, pergendakan. Secara etimologis prostitusi berasal dari bahasa Inggris prostitusi disebut *prostitution* yang artinya tidak jauh beda dengan bahasa latin yaitu pelacuran, persundalan atau ketunasusilaandengan memberi kenikmatan seksual pada kaum laki-laki.

Pekerja Seks Komersil (PSK) seseorang perempuan yang berhubungan seksual dengan orang lain atau lawan jenis dengan melakukan persetubuhan diluar perkawinan yang sah adengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.⁷

Menurut para ahli mendefinisikan secara luas terkait dengan prostitusi antara lain:

Koentjoro Pelacuran berasal dari bahasa Latin yaitu *pro-stituere* atau *pro-stauree* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan, dan pergendakan. Sehingga pelacuran atau prostitusi bisa diartikan sebagai penjualan jasa seksual, seperti oral seks atau hubungan seks untuk uang. Pelacur wanita disebut *prostitutue*, sundal, lonte.

Profesor W.A Bonger dalam tulisannya *Maatschappelijke Orzaken der Prostitutie* mengemukakan beberapa definisi daripada prostitusi atau pelacuran adalah sebagai berikut: “Prostitusi merupakan gejala kemasyarakatan dimana seorang wanita melakukan perbuatan seksual dengan cara menjual diri mereka sebagai sebuah profesi atau mata pencaharian.

⁷ Aditya, Urgensi Kriminalitas prostitusi di indonesia prespektif reformasi hukum nasional di indonesia, 2016, 20–23.

P.J de Bruine van Amstel menyatakan bahwa prostitusi merupakan suatu bentuk penyerahan yang dilakukan oleh seorang wanita kepada banyak laki-laki dengan mengharapkan feedback berupa pembayaran. Pada definisi diatas perlu digaris bawahi adanya praktik jual diri adalah dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

Kartini Kartono menjabarkan pengertian daripada prostitusi atau pelacuran adalah sebagai berikut:

1. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya dan Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan, dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.
2. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.⁸

b. Para pihak dalam Prostitusi.

Para pihak yang terlibat dalam prostitusi adalah

1. Calo yaitu seseorang yang berperan sebagai penghubung antara Pengguna Jasa dan mucikari.
2. Germo atau Mucikari adalah orang yang mata pencahariannya baik sambilan maupun sepenuhnya menyediakan, mengadakan atau membuka dan memimpin serta mengatur tempat untuk bersetubuh.
3. Pekerja Seks Komersil adalah Seorang Perempuan yang menjual dirinya untuk berhubungan seksual dengan mendapatkan imbalan uang dari pengguna jasa dan atau lawan jenisnya.

⁸ Abdi Sitepu., 'Dampak Lokalisasi Prostitusi Terhadap Perilaku Remaja Di Sekitarnya. Ilmu Komunikasi, Universitas Sumatera Utara. Hal. 176. 1', 2009, 13–46.

4. Pengguna Jasa adalah laki – laki hidung belang yang membeli dengan menggunakan uang yang diberikan kepada jasa perempuan panggilan atau PSKnya untuk melakukan persetubuhan.⁹

c. Jenis Jenis Prostitusi

1. Prostitusi Bordil: praktek prostitusi yang dapat dijumpai di rumah-rumah bordil.
2. Prostitusi Panggilan : Prostitusi dipanggil oleh si pemesan ke tempat yang telah ditentukan.
3. Prostitusi Jalan (Street Prostitution): PSK yang berdandan dan berias menyolok (Menor), untuk menarik perhatian kaum laki laki untuk dibawa oleh yang menghendakinya.
4. Prostitusi Semu: Berkedok pada beberapa kegiatan yang diijinkan atau diabaikan seperti umpamanya tukang pijat plus plus yang wanita masi muda dan cantik yang menunggu di Tempat yang sudah disediakan contoh hotel dan atau vilayang disediakan untuk melakukan pelayanan lebih dari sekedar memijat.
5. Prostitusi Secara Online : dengan cara melakukan penawaran Open Boking (BO) dan tersedia tarif harga terhadap lawan Jenisnya dengan alat pendukung (Aplikasi) di beberapa Media social yang di miliki contoh Aplikasi media : Facebook, Tantan,Mi Chat untuk mendapatkan Imbalan atau Materi.¹⁰

2. Tinjauan Umum Peraturan Perundang undangan dan Norma agama yang berkaitan Tentang Prostitusi.

1. KUHP Pasal 296, pasal 506 dan Pasal 284 Tentang Perzinaan

- a. **Dalam Pasal 296** lebih kepada germonya yang melakukan untuk memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan dijadikan untuk sebagai kebutuhan sehari hari atau kebiasaan maka ancaman hukumnya diancam dengan pidana penjara paling lama 1

⁹ Islamia Ayu Anindia and others, 'Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana', 1 (2019).

¹⁰ Wilson, Penetapan Status Tersangka Dan Korban Dalam Kasus Human Trafficking pada Tindakan Prostitusi 2016

(Satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah)”.

- b. **Pasal 506** menjerat Mucikari yang melakukan aktivitasnya dalam mencari keuntungan dari perbuatan PSK dengan ancaman hukumnya pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun”.
- c. **Pasal 284 ayat 1.** Yang di maksud Lebih kepada subyek yang berstatus dalam perkawinan dan Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan adalah 1.a. seorang pria memiliki hubungan status perkawinan yang dilakukan dengan cara (Overspel) yang di ketahui bahwa dalam pasal 27 BW berlaku pada pelakunya. 1.b. Seorang yang telah memiliki hubungan status perkawinan dengan melukan (Overspel) 2. a. dan seorang laki – laki yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal di ketahuinya bahwa laki – laki yang turut serta bersalah tersebut telah berstatus memiliki hubungan perkawinan. 2.b. Seorang yang memiliki status Hubungan dalam perkawinan yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui bahwa yang bersalah telah memiliki hubungan perkawinan dan dalam pasal 27 BW berlaku baginya. Pada ayat 2 bahwa tidak dilakukan penuntutan melakinkan atas pengaduan suami atau istri yang tercemar dan bilaan bagi mereka berlaku pada 27 BW, sehingga terdapat tenggang waktu selama 3 (Tiga) Bulan yang diikuti dengan permintaan perceraian di pengadilan Agama Bagi yang beragama islam atau pengadilan negeri bagi orang bukan beragama islam.¹¹

2. Prostitusi dalam undang undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik .

- a. **Pasal 27 ayat (1)** yang di maksud adalah Lebih kepada seorang yang melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat untuk dapat diaksesnya informasi elektronk dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan kesusilaan
- b. **Pasal 45 ayat (1)** yang dimaksud jika setiap orang sudah terpenuhi unsur subyektif dan unsur obyektif yang dimaksud dalam pasal dua tujuh ayat satu, ayat dua, ayat tiga, atau ayat empat dipidana dengan

¹¹ Lihat pasal 296, 506 dan 284 Kitab Undang – undang Hukum Pidana

pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah”.¹²

3. Prostitusi dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

- a. **Pasal 4 ayat (1)** yang dimaksud Setiap orang dilarang keras untuk menyebarluaskan, memproduksi, mengadakan, menyiarkan, mengekspor dan mengimpor, menawarkan, memperjual-belikan, menyediakan, menyewakan pornografi yang secara eksplisit memuat: 1. Kekerasan seksual, 2. Pesenggaman, yang dimaksud persenggaman yang menyimpang, 3. Onani dan masturbasi, 4. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, 5. Alat kelamin, 6. Pornografi anak..
- b. **Pasal 4 ayat (2)** yang dimaksud Setiap orang dilarang keras untuk menyediakan jasa pornografi yang menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang sangat vulgar (mengesankan ketelanjangan) dan menyajikan secara eksplisit alat kelamin dan mengeksploitasi atau aktivitas seksual dan Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Ketentuan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam pasal 29 yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan paling lama 12 bulan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 dan paling banyak Rp 6000.000.000,00 dan pada pasal 30 sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 dan paling banyak Rp. 3000.000.000,00.¹³

¹² Lihat Pasal 27, 45 undang undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik

¹³ Lihat Pasal 4,29,30, Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

4. Prostitusi dalam Undang undang No 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

a. Pasal 2 ayat (1) “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

b. Ayat (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplotasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” Pasal 12 “Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana yang menggunakan atau manfaat korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban pidana perdagangan orang.¹⁴

¹⁴ Lihat Pasal 2 Undang Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

5. Prostitusi dalam Pandangan Norma Agama sebagaimana diakui 5 agama yang sah di Indonesia ialah :

1. Agama Islam.

a. (QS Al-Isra' 17 : 32).

Dalam surat Al – Isra 17:32 Menjelaskan secara tegas “*Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji. Dan suatu jalan yang buruk*”.

b. (QS An-Nur 24 : 2)

*“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman).*¹⁵

2. Agama Hindu Budha.

Agama Hindu memandang dalam perbuatan prostitusi pun di larang secara tegas , Setip seorang yang belakukan perbuatan zina akan di masukkan keadalam neraka taptasurmi, dalam agama budha memiliki aturan yang lazim di kenal sebagai aturan dasila yakni memiliki 10 (sepuluh) larangan yang wajib di jauhi oleh para pengikut agama budha golongan bhiksu dan aturan pacasila yang dilarang keras melakukan perbuatan prostitusi (Perzinaan) bagi golongan orang awam.

3. Agama Khonghucu

Dalam aturan kitab Si Shu atau Kitab Bing Cu Men Zi VII: 17.1. Bahwa Secara Tegas Melarang melakukan perbuatan hubungan badan di luar perkawinan dan melarang oleh siapapun yang melakukan hubungan badan di luar perkawinan.

¹⁵ Ibid.

4. Agama Kristen dan Katolik.

Al- kitab Korintus 6: 9- 10 bahwa dilarang keras untuk melakukan perbuatan Prostitusi (Perzinaan) dan tidak akan mendapatkan bagian dari kerajaan Allah.¹⁶

6. Tinjauan Umum Tentang Konsep Teori Kriminalisasi.

Kriminalisasi merupakan suatu obyek hukum pidana Materiil (*substantive criminal law*) dengan pembahasan penentuan perbuatan sebagai tindak pidana (kejahatan) dengan ancaman dan saksi pidana tertentu. perbuatan tercela yang sebagaimana sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan yang telarang diakui sebagai perbuatan delik yang diancam dan mendapatkan sanksi pidana.

Menurut para pakar/ahli di bidang Hukum sebagai berikut:

- a. Soerjono soekanto berpendapat bahwa kriminalisasi adalah tindakan atau perbuatan tertentu yang oleh masyarakat diasumsikan sbagai perbuatan yang dapat dipidanakan menjadi perbuatan tindak pidana.
- b. Scolten Berpendapat bahwa Kriminalisasi adalah perbuatan tindak pidana yang timbul dari pikiran yang secara tidak ditegaskan dan tidak di tuangkan dalam undang – undang

Kriminalisasi memiliki tiga asas yang perlu di perhatikan legislator dalam menetapkan suatu produk hukum tindak pidana dan ancaman sanksinya, yakni: a. Asas legalitas, b. Asas subsidiaritas dan c. Asas persamaan/kesamaan.

Penjelasan salah satu asas hukum kriminalisasi yaitu; a. asas legalitas di kemukakan oleh von feurbach dalaam ungkapannya yakni *nullum delictum*, “*nulla poena sie pravia lage poenali*” yang mengandung arti bahwa “tidak ada suatu perbuatan tindak pidana kecuali atas perintah undang – undang. Asas legalitas tersebut yang paling dasar dalam penetapan kriminalisasi.¹⁷

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Salman Luthan, ‘Asas Dan Kriteria Kriminalisasi’, *Junal Hukum*, 16.1 (2009), 1–17.

Menurut Simposium Pembaharuan Hukum Nasional di Semarang pada bulan Agustus 1980, kriteria umum kriminalisasi adalah sebagai berikut:

- a. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
- b. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasil yang akan dicapai, artinya *cost* pembuatan undang-undang, pengurusan dan penegakan hukum serta beban yang dipikul oleh korban dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
- c. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
- d. Apakah perbuatan- perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa Indonesia, yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmur, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.¹⁸

Menurut Soedarto, terkait dengan kriminalisasi ada 4 hal yang perlu di perhatikan yakni :

- a. Kriminalisasi memiliki peran penting dalam pembangunan hukum dalam suatu negara untuk ketertiban masyarakat dan menciptakan negara kesejahteraan.
- b. Kriminalisasi dapat di buktikan dengan perbuatan yang menimbulkan kerusakan meluas dan menimbulkan korban
- c. Mengkriminalisasikan harus memperhatikan faktor pengeluaran biaya dan hasil yang di peroleh harus seimbang.

¹⁷ Leni Fuji Lestari, 'Model Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Jasa Pekerja Seks Komersial Di Indonesia Oleh', V (2018), 1–15.

- d. Dan memperhatikan kemampuan alat negara untuk Harus berdasarkan kemampuan aparat penegakan hukum dan jangan sampai melampaui beban dan batas.¹⁹

7. Tinjauan Konsep Pembaharuan Hukum Pidana.

Konsep Pembaharuan Hukum Pidana Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan Menggalih dan penilaian kembali nilai-nilai sosio- politik, sosio-filosofis dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana.

Pembaharuan hukum pidana nasional merupakan suatu kewajiban untuk segera disahkan dalam rangka mengubah dan mengganti KUHP warisan kolonial belanda yang tidak sesuai dengan perkembangan hukum di indonesia yang berdasarkan pada nilai nilai yang berkembang di masyarakat.

Menurut para ahli terkait dengan pembaharuan hukum pidana ialah :

- a. Barda Nawawi Arief Berpendapat bahwa pembaharuan hukum merupakan kegiatan yang terus menerus dan selalu tidak mengenal henti.
- b. Jerome Hall berpendapat *improvement of the criminal law should be a permanent on going enterprise and detailed records should be kept.*(perbaikan/pembaharuan atau pengembangan hukum pidana harus merupakan suatu usaha permanen yang terus menerus dan berbagai catatan/dokumen rinci mengenai hal itu seharusnya disimpan dan dipelihara).
- c. Prof Sudarto,berpendapat bahwa dalam melaksanakan pembaharuan KUHP sekurang – kurangnya ada 3 alasan yang mendasar dalam merancang pembentukan KUHP yakni politis, sosiologis dan praktis.²⁰

¹⁹ Rahmat Hi Abdulah,Fiati Justisia Jurnal Ilmu Hukum : Urgensi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, 9.2 (2015), 168–81.

²⁰ Ibid.

Dengan dimensi dan optik demikian, pada dasarnya secara konkret memang diperlukan pembaharuan hukum di bidang hukum pidana. Bertitik tolak pada pemikiran diatas, Maka dalam konsep formulasi Rancangan Kitab Hukum Pidana menjadikan satu kesatuan yang tidak tidak di lepaskan ide atau kebijakan dalam pembangunan suatu system hukum nasional untuk menggali nilai – nilai kehidupan bangsa dan tanah air yang berlandaskan Pancasila dan sumber – sumber hukum lainnya . Pada Pancasila di dalamnya memiliki tiga poin inti yang di simpulkan menjadi 3 pilar dalam keseimbangan nilai/ide/paradigma:

1. Nilai moral religius (Ketuhanan);
2. Nilai kemanusiaan (Humanistik);
3. Nilai Kemasyarakatan (Nasionalistik,demokratik, keadilan social).

H. Metode Penelitian

Metode penelitian penulis merupakan Strategi dengan cara analisis normative untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.

1. Metode pendekatan

Adapun Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan atau (statute approach) dan (analytical and conceptual approach) pendekatan analisis konsep hukum.²¹

2. Jenis bahan hukum

Bahan hukum yang digunakan ini meliputi :

a. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis antara lain :

1. Undang – undang No 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang – undang Hukum Pidana.
2. Undang - undang No 11 Tahun 2008 Tentang informasi transaksi elektronik.
3. Undang - undang No 44 tahun 2008 tentang pornografi.
4. Undang - undang No 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

²¹ Amiruddin,Pengantar metode penelitian hukum. depok: PT. Raja Grafindo Persada

5. Rancangan Kitab Undang –undang Hukum Pidana.

b. Bahan hukum sekunder.

Data yang di peroleh dari studi pustaka berupa , buku – buku , jurnal - jurnal, artikel atau sumber lainnya yang berhubungan dengan penulisan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

c. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia , kamus hukum ,eksiklopedia dan lainnya mengenai Penelitian judul Penulis ”.

d. Teknik pengumpulan bahan hukum.

Analisis normatif juga mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data peneitiannya. Bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*). Bahan-bahan hukum terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah hukum, bahan-bahan tertulis lainnya termasuk data-data dari media cetak dan elektronik serta kamus-kamus hukum.

e. Teknik analisis bahan hukum

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif yakni pemilihan teori – teori, asas- asas, norma norma , doktrin dan pasal – pasal dalam undang – undang , data yang dianalisis secara kualitatif tersebut akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antar jenis data . selanjutnya semua data di seleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukum atau teorinya dan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang diajukan terhadap penelitian yang dimaksud.

I. Pembahasan

1. Bagaimana Kontruksi Tindak Pidana Prostitusi dalam KUHP dan RUU KUHP dikaitkan dengan Norma Agama ?

Rekontruksi adalah membangun kembali sistem hukum pidana indonesia yang berkaitan dengan *Legal reform dan Legal development* dalam formulasi pembangunan system dan pembaharuan hukum. Sistem hukum terdiri dari Legal culture, legal substance and legal structure maka mencangkum secara universal yaitu :

- a. Pembangunan Subtantif hukum pidana materiel KUHP dan UU diluar KUHP, Hukum Pidana Formal (KUHP) dan Hukum Pelaksanaan Pidana;
- b. Pembangunan struktur meliputi antara lain penataan lembaga, sisten managemen dan mekanisme sarana prasarana pendukung dari sistem peradilan pidana
- c. Pembangunan budaya hukum pidana perlu di Perhatikan dalam kesadaran dalam diri seseorang, perilaku, pendidikan dan ilmu pengetahuan.²²

Prostitusi secara Pengertian etimologi yaitu Berasal dari bahasa latin yakni prostituare adalah menjajakan dirinya untuk berbuat asusila (zina), Pencabulan dan Persundalan. Secara terminology prostitusi menurut KBBI ialah : kata lancur yang berarti malang, celaka,sial, gagal atau buruk laku Pelacur adalah perempuan yang melacur, sundal, wanita tuna susila. Pelacuran adalah perihal menjual diri sebagai pelacur, penyundalan.

Praktik prostitusi sebagai praktek seksual yang dilakukan sesaat yang bisa dilakukan dengan siapa saja untuk memperoleh imbalan berupa uang. Praktik prostitusi berhubungan secara bebas dan melakukan seks

²² Enny, Draf Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Kitab Undang Undang Hukum Pidana, 2015, Pp. 1–539

tanpa emosi, tanpa peesaan cinta kasih yang dilakukan laki laki dengan Pekerja seks komersil.

Perkembangan Pekerja praktik prostitusi saat ini menggunakan internet dalam melakukan aktivitasnya yang lebih menjamin aman dari razia petugas, sebelumnya dalam praktik prostitusi melakukan aktivitasnya secara langsung di jalanan dan tidak terlihat aman, dengan demikian adanya media elektronik basis online cukup sangat mudah di pergunakan dalam aktifitasnya.

Adapun Para pihak yang terlibat dalam praktik prostitusi ialah:

- a. Germo atau Mucikari adalah seorang yang mendapatkan keuntungan sebagai mata pencaharian dari pekerja seks komersil dan memberikan tempat untuk melakukan perbuatan persundalan.
- b. Pekerja Seks Komersil (PSK) adalah perempuan yang menjajakan dirinya dengan pengguna jasa.
- c. Pengguna Jasa adalah yang membeli pekerja seks komersil untuk berhubungan seks.²³

Analisis Tindak pidana Praktik Prostitusi di Tinjau dari perspektif KUHP, maupun diluar KUHP.

Adapun analisis tindak pidana praktik prostitusi dalam persepektif kitab undang- undang hukum pidana ialah :

Bedasarkan pasal 296, pasal 506 dan pasal 284 dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana.

Sebagaimana dalam pasal 296 Berbunyi Barang siapa dengan sengaja (Subyektif) menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikan sebagai pencarian atau kebiasaan (Obyektif) diancam pidana 1 tahun 4 bulan dan denda lima belas ribu rupiah. Pasal 506 berbunyi barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul dengan seorang perempuan dan menjadikan sebagai pencarian diancam pidana kurungan paling lama 1 tahun dan Pasal 284 ayat 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan 1.a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan mukah (overspel) padahal

²³ Anindia, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Journal Pembangunan Hukum Indonesia (2019), Hal 18-30

diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya; 1.b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan mukah. 2. a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin. 2.b. Seorang yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin. pasal 27 BW berlaku baginya. Pada ayat 2 Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pindah meja atau ranjang karena alasan itu juga.

Berdasarkan Analisis Penulis Bahwa para pekerja seks komersil dan pengguna jasa PSK jika tinjau dalam pasal 296 dan pasal 506 tentang kejahatan kesusilaan bahwa secara unsur-unsur subyektif maupun unsur obyektif dalam penjelasan tersebut tidak terpenuhi sebagai pelaku perbuatan kejahatan kesusilaan yang hanya terkena sanksi atau ancaman hukum ialah mucikar dan/atau germo yang sebagaimana mengambil keuntungan dari pekerja seks komersil tersebut bahwa dapat disimpulkan dalam pasal 296 dan pasal 506 memiliki kelemahan bahwa prostitusi hanya mengancam pada Calo, germo atau mucikarinya saja, bukan pelacur dan Pengguna Jasa PSK. Dan praktik prostitusi berdasarkan dalam pasal 284 pekerja seks komersil dan pengguna jasa dapat diancam pidana apabila diketahuinya bahwa pekerja seks komersil dan Pengguna jasa bersatus dalam perkawinan dan bisa dilaporkan dengan delik aduan mereka atas tuduhan perzinah. dengan demikian pasal 284 memiliki kelemahan PSK dan Pengguna Jasa rata-rata Usia Dewasa yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pekerja seks komersil dan pengguna jasa tidak tersentuh dengan ancaman hukum tersebut.

Maka pembangaunan hukum nasional sudah layak nya di revisi dan menelusuri Sumber hukum dan menggali norma- norma dan nilai-nilai yang berkembang dan hidup di dalam masyarakat untuk mewujudkan tujuan hukum yang memenuhi cita hukum (*ius konstituteum*) di tengah masyarakat.

Adapun analisis peraturan tentang prostitusi secara khusus di luar Kitab undang-undang kitab hukum pidana ialah :

Tinjauan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 27 ayat 1 jo pasal 45 unsur-unsur dalam pasal tersebut terkait dengan permasalahan prostitusi belum terpecahkan permasalahan praktik prostitusi, yang kemudian dijerat oleh hukum hanya pada subyek yang dengan sengaja tanpa hak mentranmisikan dengan sengaja contoh menyebarkan foto asusila pada orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya foto tersebut dalam praktiknya yang kemudian yang dijerat oleh hukum melainkan orang tau mucikari.

Maka perlu adanya pembaharuan hukum pidana guna memiliki kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat sebab praktik prostitusi merupakan penyakit dalam masyarakat.

Tinjauan undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dalam pasal 30 juncto pasal 4 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak.

bahwa berdasarkan analisis penulis penjelasan dari undang-undang tersebut hanya memberikan sanksi hukum jika terpenuhi unsur-unsur tentang penyebaran gambar sketsa atau video yang bermuatan kesusilaan. Jika dalam perspektif praktik prostitusi berdasarkan analisis penulis bahwa dalam hal ini tidak tercover dari permasalahan praktik prostitusi sebagaimana dalam pasal tersebut tidak menjerat PSK maupun pihak

pengguna jasa seks maka perlu adanya pembaharuan hukum agar menghasilkan suatu kepastian hukum.²⁴

Menurut undang – undang 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam pasal tersebut dalam kasus prostitusi yang bisa di jerat oleh hukum adalah orang yang memperdagangkan orang dengan menggunakan, perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan.

Berdasarkan analisis penulis bahwa dalam undang – undang tersebut praktik prostitusi di kenakan sanksi apabila terpenuhi jika terbukti dengan cara kekerasan dan pekerja seks serta pengguna dalam undang undang tindak pidana perdagangan orang tersebut tidak tercover sehingga PSK dan Pengguna Jasa tidak kenakan sanksi berdasarkan undang – undang tersebut.

Praktek prostitusi dalam Rancangan Kitab Undang – undang Hukum Pidana Revisi pada tahun 2019 termuat dalam bagian ke empat tentang perzinaan pasal 417 ayat 1 yang berbunyi: Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Dipidana Karena zina dengan pidana penjara paling lama 12 tahun Pada ayat 1 laki laki dan perempuan yang masing masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.

Berdasarkan analisis penulis bahwa dalam pasal tersebut memiliki kelemahan yakni merupakan delik aduan sebagaimana dalam ayat 2 yang berbunyi tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, Orang Tua atau anaknya. Bahwa bab xv tentang tindak pidana kesusilaan pada bagian ke empat tentang perzinaan memiliki kelemahan dan multitafsir bahwa selama itu dalam praktik prostitusi tidak ada yang

²⁴ Herman, 'Pengaturan Dan Sistem Penyelesaian Tindak Pidana Prostitusi Online Menurut Hukum Positif', *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 4.2 (2019), 130

mengadukan maka tidak bisa di kenakan pidana dan delik aduan di batasi hanya yang bisa mengadi suami atau istri, orang tua dan anak.²⁵

Analisis Perbuatan Tindak Pidana Prostitusi perspektif Norma Agama yang diakui secara sah di indonesia ialah :

1. Agama Islam.

a. (QS Al-Isra' 17 : 32).

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji. Dan suatu jalan yang buruk”.

b. (QS An-Nur 24 : 2)

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman).²⁶

2. Agama Hindu Budha.

Agama Hindu memandang dalam perbuatan prostitusi pun di larang secara tegas , orang yang berzina akan dimasukkan kedalam neraka yang bernama taptasurmi, dalam agama budha mengenal aturan dasila yakni sepuluh larangan yang harus dijahui oleh umat budha golongan bhiksu dan pancasila lima larangan yang patut untuk di jauhi oleh budha dari golongan orang awam salah satunya terkait dengan zina.

3. Agama Khonghucu (confusius).

Melarang hubungan badan di luar nikah di larang untuk dilakukan oleh siapapun sebagaimana diatur dalam kitab Si Shu / Kitab Bing Cu Men Zi VII : 17 .1.

²⁵ Shalahudin, Dkk, "Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Online", E-Jurnal.Unisda:Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Online, 1.1 (2017), 1–13.

²⁶ Ibid.

4. Agama Kristen dan Katolik.

Al- kitab Korintus 6: 9- 10 bahwa zina disebut sebagai perbuatan yang tercela, yang pelakunya tidak dapat mewarisi kerajaan Allah.²⁷

Berdasarkan analisis penulis dapat disimpulkan dari 4 norma agama yang diakui bahwa dalam perbuatan praktik prostitusi dikaitkan dengan norma agama yang sah di Indonesia bahwa dengan keyakinan aturan dalam agama tersebut lebih sempurna dari pada hukum nasional yang berlaku tersebut dalam hal ini bahwa secara aturan norma agama tidak menunjukkan pembatasan atau perbedaan dalam perzinahan bahwa secara tegas baik yang terikat dalam perkawinan maupun non perkawinan dalam perbuatan yang dikategorikan sebagai perzinahan secara tegas dilarang dan akan mendapatkan sanksi berat berdasarkan aturan norma agama.

Dari beberapa keseluruhan regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana prostitusi baik secara umum dalam KUHP dan secara Khusus di Luar KUHP dan Rancangan KUHP Penulis berpendapat bahwa tidak sesuai dengan Asas – asas dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan yang baik sebab tidak berdasarkan sebagaimana sumber dari peraturan tersebut yang wajib bersumber pada Pancasila dalam hal ini sila 1 Ketuhanan yang maha esa, dengan demikian undang-undang yang berlaku tidak tercover seluruh para pihak prostitusi hanya sebatas mejerat mucikari dan germo bahwa dalam pembuatan peraturan yang ideal maka perlu menggali berdasarkan landasan filosofi , landasan sosiologis, landasan yuridis dan menyesuaikan dengan menggali asas –asas dalam pembentukan peraturan perundang – undangan yang baik untuk mewujudkan cita hukum dalam Pembaharuan atau pembangunan hukum pidana di tengah-tengah masyarakat sehingga ukuran tercapainya hukum yang berkeadilan, kepastian dan kemanfaatan.

²⁷ *Ibid.*

2. Kontruksi Perumusan Tindak Pidana Prostitusi yang Ideal dan sesuai dengan Norma Agama bagi masyarakat Indonesia.

Kontruksi hukum merupakan penataan regulasi yang strategis dalam pelaksanaan *Legal reform* yang di cita – citakan oleh masyarakat. Maka dalam persoalan praktik prostitusi yang sangat meresahkan bagi masyarakat untuk mencangkup subyek hukum PSK dan Pengguna jasa PSK yang perlu di jerat oleh hukum maka perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan.

Pembentuk aturan itu harus medatangkan tatanan hukum yang ideal , dan tatanan aturan yang wajib mendasarkan pada moral bangsa dimana hukum dibuat atau disusun, bertumbuh dan berkembang. moral bangsa menjadikan suatu pepadu bagi asas - asas hukum yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang - undangan yang baik dengan mengacu pada landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis.

Adapun dalam landasan filosofi , landasan sosiologis, landasan yuridis anantara lain ialah

- a. Landasan filosofis : *Legal reform* Hukum pidana wajib segera disahkan dan harus berdasarkan pada tujuan nasional dan yang di cita-citakan oleh bangsa setanah air yang merdeka dan berdaulat. Perbuatan praktek prostitusi pada aspek normatif yuridis tidak sesuai dengan perkembangan zaman bahwa di ketahui masi dalam produk warisan belanda dan perlu untuk di sesuaikan dengan kata lain pembaharuan hukum pidana serta menggali nilai nilai filosofis negara indonesia.
- b. Landasan sosiologis : Perbuatan praktek prostitusi di faktori dengan keadaan ekonomi, sosial dan agama yang sangat minim memiliki pengetahuan yang sangat luas sehingga semakin marak praktek lokalisasi prostitusi di negara indonesia baik dari segi kalangan artis maupun masyarakat biasa, dalam hal ini yang perlu di seriuskan oleh para legislator untuk mengkhususkan subtansi terkait dengn praktek

prostitusi dan mengumpulkan data – data obyektif untuk menganggulangi atau upaya preventif sehingga terbentuknya suatu keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan di masyarakat.

- c. Landasan Yuridis : Pembuatan prostitusi dalam Regulasi baik secara umum ataupun secara khusus yang berlaku pada saat ini yang berkaitan dengan norma kesusilaan, kesopaan dan lain sudah tidak sesuai dengan norma norm yang ada di masyarkat dalam hal ini di perlukan untuk suatu pembaharuan hukum yang ideal dalam masyarakat.

Maka Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis tersebut diatas pertimbangan atau alasan perlunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang baru dibentuk dengan memperhatikan:

- a. Kesadaran dan cita hukum yang bersumber pada nilai- nilai norm agama dan Pancasila.
- b. Dalam kebutuhan hukum perlu memperhatikan negara dan masyarakat dengan data fakta empiris mengenai persoalan hukum pidana nasional.
- c. Regulasi yang telah ada akan berdampak pada subtansi atau materi yang akan diatur.²⁸

Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum dan menjadi utama dalam pembentukan peraturan perundang -undangan yang secara tegas dalam pasal 2 undang - undang nomor 10 tahun 2004 yang menyebutkan pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum.

Adapun hukum nasional yaitu hukum atau peraturan perundang-undangan yang didasarkan kepada Filososif negara republic Indonesia , yakni Pancasila dan UUD NRI 1945.

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila sistem hukum nasional dilihat sebagai substansi hukum, maka sistem hukum nasional adalah sistem hukum Pancasila. Sistem hukum nasional harus berorientasi pada tiga pilar:

- a. Berorientasi pada nilai- Ketuhanan (Religiusitas).
- b. Berorientasi pada nilai- Kemanusiaan (humanistk).

²⁸ *Ibid.*

- c. Berorientasi pada nilai- Kemasyarakatan (nasionalistik, demokratik, berkeadilan sosial).

Bernard Arief Sidharta berpendapat bahwa tatanan hukum nasional harus mengandung enam ciri;

- a. Berwawasan kebangsaan dan nusantara;
- b. Mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis kedaerahan dan keyakinan keagamaan;
- c. Sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi;
- d. Bersifat rasional yang mencakup rasionalitas efisiensi, rasionalitas kewajaran, rasionalitas kaidah, dan rasionalitas nilai;
- e. Aturan prosedural yang menjamin transparansi, yang memungkinkan kajian rasional terhadap proses pengambilan putusan oleh pemerintah;
- f. Responsive terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat.²⁹

Menurut Rudol stammler, cita hukum adalah sebagai konstruksi pikir yang merupakan kewajiban yang mengarah hukum kepada Keadilan, kepastian dan kemanfaat.

Menurut Gustav Radbruch Berpendapat bahwa *ius constitutum* bukan hanya berfungsi sebagai indikator yang bersifat regulatif, yang menguji apakah hukum positif adil atau tidak , melainkan sekaligus berfungsi sebagai dasar yang bersifat konstitutif yang menentukan bahwa tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya sebagai hukum tan sebagai cita-cita yang diinginkan masyarakat.³⁰

Maka dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan yang ideal dalam merumuskan di dalam tindak pidana praktik prostitusi perlu diperhatikan asas – asas pembentukan peraturan perundang – undangan yang meliputi yakni :

²⁹ Prati Rahayu Achmad Irwan Hamzah, Mukhidin, "Pembangunan Hukum Nasional Sebagai Implementasi Tujuan Nasional", Prosiding SENDI _U 2018, 1.3 (2018), 978–79.

³⁰ Otong Rosadi, 'Hukum Kodrat, Pancasila Dan Asas Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia', Id.Scribd., VOL10 (2012), 282–90.

- a. Kejelasan tujuan : setiap pembentukan regulasi harus memiliki tujuan yang jelas untuk mencapai indikator
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat ; setiap jenis regulasi harus di buat oleh lembaga yang berwenang jika di ketahui bukan pejabat atau lembaga yang berwenang dalam pembentukan jenis regulasi maka akibat hukumnya dapat di batalkan dan atau batal demi hukum.
- c. Kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan; dalam pembentukan regulasi harus memperhatikan muatan materi yang tepat, jenis dan hirarki regulasi
- d. Dapat dilaksanakan : setiap regulasi harus memperhitungkan peraturan efektivitas regulasi di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah setiap regulasi di buat memang dalam keadaan dibutuhkan untuk bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan setanah air.
- f. Kejelasan Rumusan; adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan dapat di mengerti.
- g. Keterbukaan adalah bahwa pembentukan regulasi mulai dari perencanaan ,penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.

Dalam perbuatan praktik prostitusi dari aspek regulasi yang berlaku yang merupakan sebagai perbuatan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP bahwa mengingat pasal 296 dan pasal 506 KUHP dan regulasi di luar KUHP yang berkaitan dengan Kesusilaan dalam persoalan prostitusi memiliki kelemahan dari segi subyek hukum yakni pengguna jasa seks komersil dan pekerja seks komersil tidak tercover dalam KUHP dan luar KUHP sebagai subyek hukum perbuatan tindak pidana kesusilaan tersebut sehingga timbul kekosongan hukum.

Maka dalam tahap Rancangan KUHP pada saat ini yang masih dalam tahap revisi pembahasan di tataran legislative bahwa pembentukan regulasi dalam tindak pidana kesusilaan khususnya persoalan tindak pidana prostitusi. Perlu menggali konsep nilai - nilai dasar filosofis, sosiologis dan yuridis bahwa negara untuk memiliki kepastian hukum dalam masyarakat. Maka untuk membentuk regulasi yang ideal dalam konsep kriminalisasi perbuatan prostitusi di Indonesia perlu untuk menggali norma-norma agama yang terkandung dalam falsafah negara yakni Pancasila yang sebagaimana terkandung pada sila ke 1 (satu) yang berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa bahwa lima agama yang berlaku di Indonesia antara lain agama Islam, Kristen – Katolik, Hindu- Budha dan Konghucu telah menegaskan bahwa perbuatan praktik prostitusi hukumnya Haram.

Bahwa perumusan norma praktik Prostitusi penulis menawarkan perumusan dalam tindak pidana kesusilaan kepada lembaga legislatif yang berwenang terhadap pembaharuan hukum pidana atau pembangunan hukum pidana yang berkeadilan dan memiliki kepastian dan kemanfaatan sesuai dengan cita hukum.

Adapun tawaran penulis dalam perumusan Tindak pidana kesusilaan yang ideal terhadap PSK dan Pengguna jasa adalah:

Adapun tawaran penulis dalam perumusan Tindak pidana kesusilaan.

Perumusan yang ideal Tindak pidana kesusilaan pada Pengguna jasa seks Kormesil

Pasal

(1) Setiap orang yang melakukan mengajak, memanggil, memesan atau menyewa melalui media secara elektronik dan atau secara langsung dengan tujuan untuk melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan

secara komersial diancam dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun atau denda kategori II
<p>Perumusan yang Ideal Pekerja Seks Komersil.</p> <p>Pasal</p>
(1) Setiap orang yang melakukan Persetubuhan dan atau perbuatan cabul dengan atas persetujuannya untuk mendapatkan atau menerima pembayaran melalui transaksi elektronik dan atau secara langsung diancam dengan pidana paling lama 1 (satu tahun) pidadan atau denda kategori II

Alasan penulis menawarkan rekontruksi rancangan regulasi yang berkaitan perbuatan tindak pidana prostitusi disebabkan antara lain ialah:

1. Kitab undang – undang hokum pidana yang masi produk jajahan belanda yang terbatas memberikan efek jera pada mucikari dan germo dalam kejahatan kesusilaan
2. Regulasi pidana khusus undang - undang pornografi, undang - undang ite, undang – undang perdangan orang yang memiliki kelamahan untuk menjerat dan atau memberikan efekjerah kepada pekerja seks komersil dan pengguna jasa seks komersil.
3. Sebagaimana poin 1 dan 2 bahwa regulasi yang berlaku tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau yang di cita citakan oleh masyarakat untuk memberikan efek jerah terhadap pekerja seks komersil dan pengguna jasa seks komersil.

J. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka penulis dapat menyimpulkan

- a. Bahwa dalam perbuatan praktik prostitusi dari aspek regulasi yang berlaku yang merupakan sebagai perbuatan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP bahwa mengingat pasal 296 dan pasal 506 KUHP dan regulasi di luar KUHP yang berkaitan dengan Kesusilaan dalam persoalan prostitusi memiliki kelemahan dari segi subyek hukum yakni pengguna jasa seks komersil dan pekerja seks komersil tidak terpenuhi unsur unsur dalam KUHP maupun diluar KUHP sebagai subyek hukum perbuatan tindak pidana kesusilaan tersebut sehingga timbul kekosongan hukum.
- b. Maka dalam tahap Rancangan KUHP pada saat ini yang masi dalam tahap revisi pembahasan di tataran legislative bahwa pembentukan regulasi dalam tindak pidana kesusilaan khususnya persoalan tindak pidana prostitusi Perlu menggali konsep nilai - nilai dasar filosofis, sosiologis dan yuridis bahwa negara untuk memiliki kepastian hukum dalam masyarakat. Maka menggali nilai nilai filosofis Pancasila sila ke 1 Ketuhanan yang Mahesa Esa bahwa lima agama yang berlaku di Indonesia antara lain agama islam, Kristen – khatolik, Hindu- Budha dan Konghucu telah Menegaskan bahwa perbuatan praktik prostitusi hukumnya Haram.

2. Saran

- a. Bahwa Regulasi yang berlaku terkait dengan kriminalitas praktik prostitusi perlu adanya pembangunan hukum atau pembaharuan hukum pidana yang mencakup subyek hukum yang mampu menjerat PSK dan pengguna jasa seks komersial. Sehingga tidak menimbulkan kekosongan hukum dan memiliki kepastian hukum. Bahwa penulis mensarankan dalam perumusan norma terhadap praktik prostitusi wajib

memperhatikan regulasi yang berlaku serta persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang undangan dengan sistematika, pilihan kata, atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam multi tafsir dalam pelaksanaannya. Sehingga penulis menawarkan perumusan dalam tindak pidana kesusilaan kepada lembaga legislatif yang berwenang terhadap pembaharuan hukum pidana atau pembangunan hukum pidana yang berkeadilan dan memiliki kepastian dan kemanfaat sesuai dengan cita hukum

b. Adapun tawaran penulis dalam perumusan Tindak pidana kesusilaan.

<p>Perumusan yang ideal Tindak pidana kesusilaan pada Pengguna jasa seks Kormesil</p> <p>Pasal</p>
<p>(1) Setiap orang yang melakukan dengan sengaja mengajak, memanggil, memesan atau menyewa melalui media secara elektronik dan atau secara langsung dengan tujuan untuk melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan secara komersial diancam dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun atau denda kategori II</p>
<p>Perumusan yang Ideal Pekerja Seks Komersil.</p> <p>Pasal</p>
<p>(1) Setiap orang yang melakukan Persetubuhan dan atau perbuatan cabul dengan atas persetujuannya untuk mendapatkan atau menerima pembayaran melalui transaksi elektronik dan atau secara langsung diancam dengan pidana paling lama 1 (satu tahun) pidadan atau denda kategori II</p>

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdi Sitepu. 2009. "Dampak Lokalisasi Prostitusi Terhadap Perilaku Remaja Di Sekitarnya. Ilmu Komunikasi, Universitas Sumatera Utara. Hal. 176. 1." :13-46.
2. Abdulah, Rahmat Hi, Fakultas Hukum, And Universitas Gadjah Mada. 2015. "Urgensi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Urgency Of Customary Law In The Renewable Of National Criminal Law." Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum : Urgensi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional 9(2): 168-81.
3. Aditya, Lucky Elza. 2016. "Indonesia Jurnal Ilmiah Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Magister."
4. Amalia, Mia. 2018. "Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam." Tahkim ;Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam 1(1): 68–87.
5. Amiruddin, Pengantar metode penelitian hukum. depok: PT. Raja Grafindo Persada
6. Anindia, Islamia Ayu, R B Sularto, Program Studi, Magister Ilmu, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, and others, 'Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana',
7. Anindia, Islamia Ayu Et Al. 2019. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana."
8. Achmad Irwan Hamzah, Mukhidin, D. P. R. Pembangunan Hukum Nasional Sebagai Implementasi Tujuan Nasional. Pros. Sendi _U 2018 1, 978–979 (2018).
9. Cindika Eka Febriana, Dkk. 2016. "Analisis Yuridis Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Online Sebagai Kejahatan Mayantara." Diponegoro Law Journal: Analisis Yuridis Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Online Sebagai Kejahatan Mayantara 5(3): 1–7.
10. Dwiyan Achmad Hartanto, Sh, Shi, Mh. 2015. "Penanggulangan Prostitusi Online Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia Dan Hukum Pidana Islam Dwiyan Achmad Hartanto, Sh, Shi, Mh." In Prosiding Seminar Nasional Kebangkitan Teknologi, , 53–64.
11. Erfandi, 'Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembangunan Sistem Hukum Pidana Di Indonesia', [Http://Journal2.Um.Ac.Id](http://Journal2.Um.Ac.Id), 1 (2016)
12. Herman, Herman, 'Pengaturan Dan Sistem Penyelesaian Tindak Pidana Prostitusi Online Menurut Hukum Positif', Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum.
13. Handykaputri, Justicia Paramitha Angela. 2016. "Disparatis Penerapan Hukum

Dalam Penganggulan Kasus Kasus Prostitusi.”

14. Komang, Ni Et Al. 2018. “Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia?” *Articles :Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia* 07(04): 1–15.
15. Lestari, Leni Fuji. 2018. “Model Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Jasa Pekerja Seks Komersial Di Indonesia Oleh.” V: 1–15.
16. Nurbaningsih, Dr Enny, ‘Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Badan Pembinaan Hukum Nasional’, In *Draf Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, 2015, Pp. 1–539
17. Luthan, Salman. 2009. “Asas Dan Kriteria Kriminalisasi.” *Junal Hukum* 16(1): 1–17.
18. Palandi2. 2017. *Tanggung Jawab Pidana Bagi Penyedia Jasa Prostitusi Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik* Vi(1): 141–49.
19. Pratama, Shalahudin Serba Bagus dan M. Fariz Wahyu, ‘Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Online’, *E-Jurnal.Unisda:Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Online*.
20. Rosadi, Otong, ‘Hukum Kodrat, Pancasila Dan Asas Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia’, *Id.Scribd.*, Vol10 (2012), 282–90
21. Sibuea, Harris Y P. 2015. “Penegakan Hukum Prostitusi Di Indonesia.” *Info Hukum Singkat Kajian Terhadap Isu Aktual Dan Strategis : Penegakan Hukum Prostitusi Di Indonesia* Vii(10): 1–4.
22. Wilson, *Penetapan Status Tersangka Dan Korban Dalam Kasus Human Traffickingpada Tindakan Prostitusi* 2016.

Internet :

23. Amalia, *Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulan Di Kawasan Cisarua Kampung Arab* Vol 2, No 2 (2016) <https://jurnal.unsur.ac.id>.
24. Cindy Eka, Dkk, *Analisis Yuridis Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Online Sebagai Kejah Atan Mayantara (Studi Putusan No.228/Pid.B/2015/Pn.Pgp)* *Diponegoro Law Journal*, vol. 5, no.

3 (2016), <https://ejournal3.undip.ac.id>.

25. Dwiyana, Penanggulangan Prostitusi Online Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia Dan Hukum Pidana Islam. Prosiding Seminar Nasional Kebangkitan Teknologi Tahun (2015) <https://eprints.umk.ac.id>.
26. Melinda, Penggunaan Media Social Sebagai Sarana Prostitusi Online (2017) hal50-62. <https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id>.
27. Ni komang, Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online Menurut Hukum Positif di Indonesia. Vol.07, No. 04, (2018) <https://ojs.unud.ac.id>.

Undang – undang:

28. Undang – undang No 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang – undang Hukum Pidana.
29. Undang - undang No 11 Tahun 2008 Tentang informasi transaksi elektronik.
30. Undang - undang No 44 tahun 2008 tentang pornografi.
31. Undang - undang No 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
32. Rancangan Kitab Undang –undang Hukum Pidana.

